

JPS “Tak” GEMILANG, Paket Belum Siap Akhirnya Pakai Minyak Pabrikan Luar



<http://statistik.jakarta.go.id>

MATARAM-Paket bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang milik Pemprov NTB amburadul. Perdana disalurkan 16 April lalu di Kota Mataram, rupanya paket bantuan tersebut belum lengkap. Dari 10 item jenis bantuan yang harusnya ada dalam paket tersebut, yang baru ada saat ini cuma beras dan telur.

Item-item bantuan lainnya yang harusnya ada dalam satu paket JPS Gemilang tersebut seperti minyak goreng produksi IKM NTB yang dibeli seharga Rp 33 ribu satu liter, ikan kering 1 ons, susu kedelai/serbat jahe, masker non medis 3 buah, sabun lokal antiseptik 60 ml, teh kelor 1 pack (10 sachet), dan minyak kayu putih 10 ml, belum ada.

“Saya tidak tahu jenisnya seperti apa. Tapi yang jelas baru kita terima beras dan telur saja,” kata Camat Ampenan Syamsul Irawan, di kantornya, kemarin (20/4). Jika merujuk jadwal pendistribusian bantuan JPS Gemilang, pendistribusian bantuan untuk Kota Mataram harusnya sudah beres pada 16-18 April. Sementara saat ini, sesuai jadwal, perhatian Pemprov NTB sudah beralih pada pendistribusian yang dilakukan di Lombok Barat dan Lombok Utara. Pendistribusian berlangsung pada 19-24 April.

Selanjutnya pendistribusian dilanjutkan ke Lombok Tengah dan Lombok Timur pada 22-27 April. Dilanjutkan ke Sumbawa dan Sumbawa Barat pada 22-26 April. Baru ke Dompu, Bima, dan Kota Bima pada 22-28 April.

Pantauan Lombok Post, bantuan beras dan telur itu masih ditumpuk di kantor camat. Beras tersebut berbungkus karung dengan gambar Gubernur H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah dalam porsi besar. Sementara telur dalam papan tray dengan diikat tali rapia. Pihak kecamatan belum mendistribusikan karena menunggu perintah lanjutan. “Karena ini

bantuan dari provinsi, kemungkinan akan bersamaan (disalurkan) dengan bantuan lainnya,” kata Syamsul.

Menurutnya, jika langsung dibagi, dikhawatirkan ada reaksi dari warga yang belum mendapatkan bantuan. Di Kecamatan Ampenan hanya diberikan bagi 333 kepala keluarga (KK). Jumlah yang dinilai sangat sedikit.

“Kami pengen seluruh warga terdampak mendapatkan bantuan, terutama keluarga yang diisolasi,” katanya.

Bila bantuan dibagi saat ini, bisa saja timbul kecemburuan sosial. Sebab warga terdampak Covid-19 cukup banyak. “Kalau yang dibagikan hanya sedikit mungkin menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lain,” ujar Syamsul.

Pemprov juga memberikan bantuan berdasarkan nama dan alamat. Sehingga tidak boleh diberikan kepada mereka yang tidak tercantum di dalam daftar penerima. “Alangkan baiknya kita bagikan sesuai nama-namanya, tapi kalau bisa semuanya, tidak sebagian,” harapnya.

Selain itu, kecamatan juga memverifikasi lagi nama-nama penerima bantuan. Bila ada warga yang sudah meninggal atau pindah tempat tinggal, segera dilaporkan. “Kita kroscek ke bawah, kalau itu terjadi nanti kita kembalikan lagi ke provinsi melalui dinas sosial,” katanya.

Akui JPS Belum Beres

Terpisah, Kepala Dinas Sosial NTB Hj Wismaningsih Drajadiah mengklaim bahwa penyaluran bantuan JPS Gemilang di Kota Mataram sudah beres. Dia menyebut, bantuan telah disalurkan ke semua kecamatan. Untuk penyaluran ke warga pihak kecamatan yang akan membagi.

“Untuk wilayah Kota Mataram saja ada 2.695 paket,” katanya.

Karena Mataram sudah beres, maka bantuan kini sudah dilanjutkan distribusinya untuk Lombok Barat, dan Lombok Utara.

Khusus untuk Lombok Utara, sementara baru di Kecamatan Pemenang dan Tanjung. Sementara di Lombok Barat di kecamatan Lingsar dan Batu Layar. Namun, masih ada waktu hingga 24 April untuk melengkapi pendistribusian.

“Kami harap ini benar-benar terealisasi sesuai sasaran yang kita tuju,” katanya.

Untuk kualitas bantuan, Wismaningsih menjamin beras yang dibagikan beras premium dengan kualitas bagus. Termasuk telur yang dibagikan kualitasnya bagus.

Namun, disinggung soal item bantuan yang belum lengkap, Wismaningsih tak menampiknya. Minyak goreng yang akan dibeli Pemprov NTB senilai Rp 33 ribu seliter saat ini masih dalam proses pengadaan. Minyak goreng mahal itu akan dibeli dari Industri Kecil dan Menengah di NTB dan dilaksanakan Dinas Perindustrian NTB.

“Yang lainnya insya Allah sudah siap, termasuk teh, minyak kayu putih sudah siap,” klaim Wismaningsih.

Dia menyebutkan, minyak goreng belum tersedia karena produksi IKM masih terbatas. “Kami masih menunggu saja, tapi mungkin kami akan ambil alih supaya secepatnya,” kata Wisma.

Dinas Sosial NTB akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan pihak lainnya agar bantuan segera dibagikan. Sebab, komponen minyak goreng harus ada.

“Arahan Pak Gubernur kalau memang kemampuan IKM segitu tidak bisa kita paksakan, mungkin diganti atau apa nanti bentuknya,” jelas Wisma.

Sedangkan bantuan lain seperti masker, teh kelor, susu kedelai atau serbat jahe, hingga sabun antiseptik menurut Wisma tidak ada masalah. Pengadaan masker ditangani Dinas Koperasi dan UKM NTB.

Pakai Minyak Pabrik

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian NTB Nuryanti yang dikonfirmasi terpisah mengakui bahwa pihaknya kesulitan memenuhi pengadaan minyak goreng 105 ribu liter dari IKM lokal. Karena itu, untuk bulan April, bantuan akan menggunakan minyak pabrik. Hal ini akan berlangsung sampai IKM yang memproduksi minyak goreng dengan banderol Rp 33 ribu seliter tersebut siap memproduksi secara berkelanjutan.

“Keberhasilan industrialisasi akan kita lihat tiga bulan akan datang,” katanya.

Diungkapkan Nuryanti, produksi minyak goreng IKM saat ini memang masih bertahap. Produksinya pun masih sangat terbatas. Untuk April ini saja, perkiraan dirinya tak lebih dari 6.000 liter. Tapi, dia yakin, jumlah tersebut akan semakin meningkat di bulan-bulan berikutnya.

“Sesuai kemampuan IKM. Masih manual,” jelas Nuryanti.

Pihaknya akan terus melakukan pendampingan agar IKM meningkatkan kualitas dan kuantitas melalui bantuan permesinan. “Pemberdayaan IKM tidak harus target kuantitas, tetapi kontinuitas produksi yang menjadi target kami,” katanya.**(ili/kus/r6)**

Sumber Berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/21/04/2020/jps-tak-gemilang-paket-belum-siap-akhirnya-pakai-minyak-pabrik-luar/>
2. <https://www.kanalaspirasi.com/2020/04/kebijakan-paket-harga-minyak-goreng-jps.html>
3. <https://www.telusur.co.id/detail/kebijakan-paket-harga-minyak-goreng-jps-gemilang-sudah-sesuai-regulasi>
4. <http://zonamerah.net/kebijakan-paket-harga-minyak-goreng-jps-gemilang-sudah-sesuai-regulasi/>

Catatan:

Dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Covid 19 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebutkan bahwa arah kebijakan penanganan covid 19 salah satunya adalah belanja jaring pengaman sosial (JPS).¹ Kebijakan nasional mengenai JPS ini terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu JPS Pemerintah Pusat dan JPS Pemerintah Daerah.²

¹ Pasal 4 ayat (3), Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Covid 19 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

² BAB III Huruf C, Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Covid 19 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Untuk Program JPS pada Pemerintah Daerah Provinsi NTB, Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial untuk melengkapi JPS Pemerintah Pusat yang disebut JPS Gemilang ditujukan kepada:

- a. Masyarakat miskin/rentan miskin yang ada di dalam DTKS dan
- b. Masyarakat terdampak, tidak mampu atau masyarakat yang kehilangan pekerjaan/penghasilan seperti tenaga kesehatan di rumah sakit, pekerja yang dirumahkan/PHK, guru dan non guru honorer SMA/SMK, keluarga pasien dalam pengawasan (PDP), cleaning servis, penjaga malam, pedagang kaki lima, pekerja transportasi, pekerja sektor pariwisata, dan lain-lain.³

Ketentuan dalam Jaring Pengaman Sosial Pemerintah Provinsi NTB, sebagai berikut:

- a. JPS selain diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat sekaligus memberdayakan IKM dan UMKM.
- b. Mengutamakan penggunaan produk lokal dan membeli barang yang diproduksi oleh IKM dan UMKM lokal untuk dibagikan kemasyarakat melalui JPS Gemilang.
- c. Sebanyak mungkin melibatkan IKM dan UMKM sehingga dapat menjaga siklus ekonomi lokal dan memberikan alternatif lapangan pekerjaan untuk warga masyarakat terdampak, sehingga mereka masih tetap memiliki pendapatan dalam masa pandemi ini.

Adapun bentuk bantuan tersebut adalah:

- a. Paket bantuan sembako;
- b. Paket bantuan suplemen dan produk-produk IKM/UMKM lainnya;
- c. Paket bantuan masker non medis produk-produk IKM/UMKM; dan
- d. Paket bantuan lainnya.

³ BAB III Huruf C angka 2, Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Covid 19 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat